

**MANAJEMEN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN TINGGI**

*(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang
Provinsi Papua)*

SKRIPSI



**Disusun Oleh
ALFRED RICARDO ONONG
12520072**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2016**

**MANAJEMEN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN TINGGI**

*(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang
Provinsi Papua)*

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



Disusun Oleh

ALFRED RICARDO ONONG

12520072

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim penguji program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta

Pada hari : Jumat
 Tanggal : 23 September 2016
 Pukul : 13.00
 Tempat : Ruang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama :

Tanda tangan

1. **Dr. R. Widodo Triputro, M.M; M.Si.**
Ketua/ Dosen Pembimbing

2. **Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si**
Penguji Samping I

3. **Leslie Retno Angeningsih, Ph.D**
Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.

PERNYATAAN

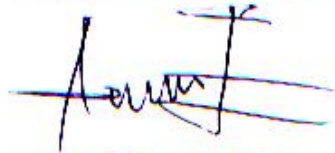
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfred Ricardo Onong
Nim : 12520072
Program studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2016



Alfred Ricardo Onong

Motto

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita

Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Tuhan Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.

Ketika orang lain dianggap kita tidak bisa berbuat apa-apa, namun iman kita mengatakan kamu pasti bisa, maka memperjuangkan hak-hak kita dan apa yang dianggap kita bisa

(Ibrani, 11:1-40)

Dengan demikian, jangan pernah putus asa dan berhenti berjuang, karena hidup adalah perlu ditekuni.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua
2. Lembaga kerja sama Pemerintah Daerah, Yayasan Bina Teruna Bakti Bumi Cenderawasih (Binterbusih) Semarang
3. Komunitas Mahasiswa Pelajar Aplim-Apom (KOMAPO) Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua
4. Kedua orangtua saya, Bapak Yakobus Onong dan Marta Mandomen
5. Bapak Kepala Desa, Dirianus Waromen dan Amina Kwem
6. Bapak Anggota DPR Kabupaten Pegunungan Bintang, Yermias Millu, S.H
7. Kepala Desa Yukul, Ruben M.Suu
8. Bapak Kepala Desa Petrus Mandomen
9. Kedua Kesayanganku, Kakak Jefri Decky Dapla dan Mince Teruran
10. Bapak Menius Meryal, S.Sos
11. Bapak Jhosua Yusack Meryal, S.Th
12. Adikku tersayang, Semul Koripye Melidam, Yebeng Undam
13. Omku tersayang Isack Meklu
14. Mamaku tersayang, Omina Otong Onong
15. Kepala Desa Kalek, Bapak Kolose Bekmal Berya
16. Adikku tersayang Matius Kwarang Berya
17. Adik-adikku tersayang, Abram Meklu, Bock Mirin, Kwabek, Beres, Decky B.Yotam B. dan semua yang saya tidak sebutkan pun rasa cinta dan kasih sayangku kepada kalian semua.
18. Iparku Anas Kaleklop Millu, dan Esau, Herry Millu

Yogyakarta, 8 Oktober 2016



Alfred Ricardo Onong

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
KATA PENGANTAR	x
SINOPSIS	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
1. Pengembangan SDM	13
2. Pentingnya pengembangan SDM	15
3. Metode pengembangan SDM	19
a. Metode Pelatihan (<i>training</i>)	20
b. Metode Pendidikan (<i>education</i>)	21
4. Bentuk bentuk pengembangan SDM	22
a. Pengembangan Secara Informal	22
b. Pengembangan Secara Formal	23
c. Pendidikan	23
d. Program Pendidikan Tinggi	26
F. Ruang Lingkup	26
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27

2. Lokasi Penelitian	27
3. Unit Analisis.....	28
4. Subyek penelitian	28
5. Teknik Pengumpulan Data.....	29
a. Observasi	29
b. Wawancara	29
c. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	29
d. Dokumentasi	30
6. Teknik Analisis Data	30

BAB II PROFIL KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 32

A. Luas Wilayah dan Pembentukan Kabupaten	32
B. Keadaan Geografis dan Administrasi.....	33
C. Keadaan Ekonomi	35
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	36
E. Keadaan Sosial Budaya	38
F. Gambaran Umum Kependudukan.....	42
G. Gambaran Umum Sumber Daya Manusia.....	44
H. Gambaran Umum Pemerintahan.....	46
1. Visi dan Misi Kabupaten Pegunungan Bintang	46
2. Program Prioritas Bidang pembangunan	48
3. Pejabat Eksekutif Kabupaten Pegunungan Bintang	50
4. Pelaksanaan Program Pengembangan SDM	52
5. Proses Pengembangan SDM melalui pendidikan tinggi	54

BAB III ANALISIS MANAJEMEN PROGRAM PENINGKATAN

SUMBER DAYA MANUSIA 60

A. Manajemen Program Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan SDM	60
B. Perencanaan Dalam Pengembangan SDM Melalui Pendidikan Tinggi.....	63
C. Pelaksanaan Dalam Pengembangan SDM Melalui Pendidikan Tinggi	72

D. Pengawasan Dalam Pengembangan SDM.....	80
E. Faktor-faktor yang mendukung dan Menghambat Pengembangan SDM.....	86
1. Faktor Pendukung.....	89
2. Faktor Penghambat.....	91
F. Strategi Mengatasi Kendala dalam Pengembangan SDM	93
BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSATAKA	100
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL	ix
a. Tabel II. 1. Nama Distrik.....	38
b. Tabel II. 2. Jumlah Penduduk Menurut Distrik	46
c. Tabel II. 3. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
d. Tabel II. 4. Pejabat Eksekutif Kabupaten Pegunungan Bintang.....	54
e. Tabel III.5. Penerima Bantuan Beasiswa Program Bantuan Pendidikan	73

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan menyusun Skripsi ini dengan judul *“Manajemen Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Tinggi”*. Dalam skripsi ini, penulis bermaksud untuk memberikan gambaran umum untuk secara garis besar tentang, Program pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal-hal yang dimaksud antara lain permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dalam perencanaan, pelaksanaan, program pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan tinggi baik Pemerintah Daerah, Dinas-dinas terkait maupun lembaga kerjasama dalam implementasi program tersebut. Sehingga masalah yang dapat penulis memberikan informasi kepada pemirsa pembaca bahwa, program pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk demi mencapai tujuan tersebut akan merangkum dalam, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terori yang dipakai untuk menjadi panduan dalam penelitian, ruang lingkup, serta metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dosen pembimbing, teman-teman, serta semua pihak yang telah mendukung dan memberikan sumbangsih yang positif sehingga peneliti mendapat referensi yang cukup untuk menyusun skripsi ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada Dosen, teman-teman, serta semua pihak untuk memberikan kritikan, saran, pertanyaan, dan rekomendasi yang positif sehingga penulis selanjutnya akan memperbaiki dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.

Yogyakarta, 14 Oktober 2016

Penyusun

Alfred Ricardo Onong

SINOPSIS

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat secara kuantitas maupun kualitas, sangat dibutuhkan oleh pihak manapun. Karena SDM merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan implementasi otonomi daerah. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, pada khususnya Kabupaten Pegunungan Bintang masih dibawah dari Kabupaten Tolikara, Asmat, Mappi, Dogiyai, Yahukimo dan Lanny Jaya. Padahal dimekarkan pada saat bersamaan sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Program pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan tinggi.

Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk melihat implementasi manajemen program lebih dalam adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian menggunakan teknik purposive dengan melakukan pemilihan informan yang memahami program. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi atau sumber data. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah pada program-program pemerintah dalam pengembangan SDM melalui pendidikan tinggi, yang dilihat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, kemudian faktor yang mempengaruhi serta strategi yang digunakan dalam mengatasi kendala atau permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Manajemen Program dalam Pengembangan SDM melalui Pendidikan Tinggi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, pada tahap perencanaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, terlihat sudah melakukan tahap perencanaan tersebut. Namun, Pada tahap pelaksanaan, program Pengembangan SDM melalui pendidikan tinggi yang dilaksanakan adalah 3 SKPD (Dinas Pendidikan, Bappeda, dan DP2KAD), dalam pelaksanaan ini boleh dikatakan kurang konsisten atau keseriusan dalam pelaksanaan dan pengawasan. Manajemen program tidak berjalan dengan maksimal. Jika ingin menciptakan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua, maka pengawasan dalam pengembangan SDM melalui pendidikan tinggi harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten agar menciptakan manusia secara berkualitas maupun kuantitas.

Kata Kunci:

Manajemen Program dalam pengembangan SDM melalui Pendidikan Tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah Pusat kepada daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Menurut Ahmad Yani (2002), salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena pendapatan asli daerah (PAD) ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani *Autos* yang berarti sendiri dan *Nomos* yang berarti aturan, Abdulrahman dalam B Hestu (1998:27), sehingga otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan penegasan tentang otonomi daerah yang diartikan sebagai “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan daerah otonom : “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah (1) Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-

masing. (2) Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Daerah otonomi mempunyai tujuan antara lain : (1) agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar (2) agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya (3) agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri, sedangkan otonomi daerah mempunyai dan menggunakan beberapa prinsip yaitu: (1) prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab (Anonim, 2016).

Kebijakan otonomi khusus Papua dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya, menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Papua bagi kemakmuran rakyat Papua, diharapkan dengan kebijakan ini akan dapat mengurangi kesenjangan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi-provinsi lainnya dengan memberikan ruang lebih bagi masyarakat lokal Papua dan Papua Barat sebagai subyek utama dalam pembangunan. Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya

kesenjangan hampir pada semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk orang asli Papua dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan (Maniagasi, 2001: 65).

Istilah “*otonomi* “ dalam Otonomi Khusus Papua diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan. Hal lain tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan strategis pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua (Sumule, 2002: 39-40).

Hal ini penting sebagai bagian dari pengembangan jati diri orang Papua yang seutuhnya ditunjukkan dengan penegasan identitas dan adat istiadat yang dimilikinya. Istilah “*khusus* “diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat dari berbagai aspek. Dalam pengertian praktisnya, kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di Papua.

Menurut, Kaho (1998: 38-40) yang menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau

subyek harus baik pula atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mamesah mengutip pendapat Manulang (1995: 23) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Faktor ketiga ialah anggaran, sebagai alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula. Faktor peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor, transportasi, alat komunikasi dan lain-lain. Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya. Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, Mamesah (1995: 34) mengatakan

bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya. Diantara faktor-faktor tersebut yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut. Didalam pelaksanaan otonomi daerah sangat penting dan sangat membutuhkan sumber daya manusia, karena kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat.

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang tepat secara kuantitas maupun kualitas, sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh Joseph Riwukaho (1988: 27), sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi otonomi daerah. Dalam wacana tentang desentralisasi pun, SDM atau personalia merupakan faktor determinan yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan, selain faktor pembiayaan dan prasarana.

Menurut Silalahi dalam Rusydi (2010: 34), sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah : (a) Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu; (b) Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi; (c) Mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang

mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai orientasi berpikir *people centered orientation*; dan (d) Mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan.

Menurut Tim Fisipol Universitas Gajah Mada dalam Rusydi (2010), terdapat 4 (empat) unsur otonomi daerah, yaitu: (1) Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya kepala daerah DPRD, dan pegawai daerah; (2) Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah; (3) Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah. (4) Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, demi meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2007 sudah mengambil kebijakan untuk: (1) Memberikan pelatihan dan ketrampilan kepada masyarakat di semua sector (2) Memberikan pendidikan formal berupa beasiswa khususnya pendidikan ditingkat perguruan (3) Memberikan kemudahan bagi setiap warga Pegunungan Bintang dibidang kesehatan ketika sakit, dalam bentuk menanggung biaya transportasi udara oleh dinas kesehatan, sehingga prioritas utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah Pendidikan (BPS, Kabupaten Pegunungan Bintang, 2009).

Lahirnya undang undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Ketetapan Dana pendidikan sebesar 20% adalah kebijakan pemerintah sebagai hasil dari proses politik. Sejak tahun 2009 tampaknya pemerintah Indonesia memiliki *political will* yang tegas dan berani untuk meningkatkan kualitas, martabat, daya saing tinggi melalui prioritas kebijakan pada sektor pendidikan sebagai upaya memajukan dan memakmurkan bangsa dan negara.

Salah satu unsur terpenting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan adalah mencerdaskan bangsa dengan penyediaan sumber dana, baik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ataupun sumber-sumber lain yang mendorong meningkatkan sumber daya manusia. Meskipun anggaran biaya pendidikan bukan satu-satunya penentu tercapainya pendidikan berkualitas, tanpa anggaran biaya yang memadai pendidikan akan membuahkan hasil tidak memuaskan. Tercukupinya anggaran pendidikan sesuai dengan konstitusi, maka diharapkan tercapainya kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

Ketika tercipta SDM yang berkualitas, tentunya kesejahteraan hidup masyarakat turut meningkat pula. Kegiatan produksi diberbagai sektor ekonomi melaju pesat, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dan kesadaran pentingnya sikap toleran yang berdemokrasi akan berkembang sehingga terbentuklah masyarakat madani yang dicita-citakan. Jika masyarakat madani telah terwujud, stabilitas daerah dan politik kekuasaan akan menjamin kemakmuran suatu bangsa dan Negara.

Maju atau mundurnya pembangunan suatu daerah tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, tanpa sumberdaya manusia yang handal proses pembangunan akan terhambat. Sumber daya manusia identik dengan pendidikan, tanpa pendidikan sumber daya manusia yang handal tidak akan ada, sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM yang merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Menurut laporan *Human Development Report* 2013 yang dikeluarkan Organisasi Program Pembangunan PBB atau *United Nation Development Program* (UNDP) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia kalah jauh dibandingkan negara terdekatnya Singapura dan Malaysia. Jika Indonesia berada di posisi 121 dunia, kedua negeri jiran ini bertengger masing-masing di posisi 18

dan 64 dunia. Kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua merupakan yang terendah dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data IPM Papua sampai dengan 2011 adalah 69,68 %. Hal ini dilihat berdasarkan angka harapan hidup 70,3 %, angka melek huruf 88,19 %, rata-rata lama sekolah 68 %, dan pengeluaran perkapita 7%. Angka tersebut menunjukkan pembangunan dibidang pendidikan harus mendapatkan prioritas penting agar putra-putri Papua dapat menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Untuk IPM di Papua, kabupaten Pegunungan Bintang masih dibawah Kabupaten Tolikara, Asmat, Mappi, Dogiyai, Yahukimo dan Lanny Jaya, padahal beberapa kabupaten dimekarkan pada saat bersamaan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, kecuali kabupaten Dogiyai, dan Lanny Jaya dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008. IPM untuk kabupaten Pegunungan Bintang angka harapan hidup 66.00 %, angka melek huruf 32.50 %, rata-rata lama sekolah 2.54 %, pengeluaran perkapita disesuaikan 588.02 % dan IPM 49.45 (*Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang. 2013*).

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan merupakan prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011-2016. Kondisi pendidikan yang memprihatinkan telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak awal mulai berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang. Mulai tahun 2003 hingga saat ini telah banyak dilaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan telah memberikan dampak membaiknya kondisi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya anggaran dan aparatur serta hambatan kondisi geografis wilayah yang berat, tujuan pembangunan pendidikan di daerah belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, langkah strategis lain yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya mempersiapkan putra-putri asli sebagai generasi penerus bangsa, sejak 2003 pemerintah daerah berupa pengiriman siswa-siswi untuk menempuh pendidikan di luar kabupaten baik di Papua maupun luar Papua.

Demikian juga Pemerintah Daerah tengah menjadi kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kaitan hal tersebut, beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Bantuan dana pendidikan per tahun untuk S1 dan S2 di Perguruan Tinggi di Papua: Uncen, Unipa, USTJ, Uniyap, UOG, Stikom, STIE Port Numbay, STT Fajar Timur, STT Waterpost, IPI, dsb. Kerja Sama MOU lembaga-lembaga dan perguruan tinggi diluar Papua: Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sanata Dharma (USD), STPMD Yogyakarta, Surya Institut. Pengiriman mahasiswa ke STPDN Jatinangor Bandung, Pengiriman ke Perguruan Tinggi di Cina, pembekalan bahasa Inggris di *Asia Pasific International University (APIU)* Thailand, sekolah pilot di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curub dan yang sekarang adalah program beasiswa melalui UP4B. (<http://www.oksnews.com>, diakses pada tanggal 06 April 2016, 19:20).

Berdasarkan data Komunitas Mahasiswa Pelajar Aplim Apom (Komapo), pengiriman mahasiswa dan pelajar dimulai tahun 2003, dengan jumlah mahasiswa 12 orang ke kota studi Yogyakarta tanpa ada kerja sama dengan pihak manapun (pengiriman langsung). Pada waktu itu pemerintahannya pada masa *caretaker* (pejabat sementara, tidak ada pelantikan dan SK) sehingga mahasiswa tidak diurus secara serius. Banyak hambatan yang di hadapi, terutama manajemen keuangan tidak jelas, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan pendidikan, kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sosial kemasyarakatan, kurangnya kontrol atau evaluasi sehingga berdampak pada prestasi dan kesuksesan dalam menempuh pendidikan.

Melihat fenomena tersebut pemerintah daerah dengan cepat mempercayakan Yayasan Bina Teruna Indonesia Bumi Cenderawasih (Binterbusih) untuk mendampingi dan memfasilitasi mahasiswa hingga menyelesaikan studinya. Pada waktu itu pemerintah tidak secara resmi (MOU) dengan yayasan Binterbusih, tetapi karena berkat Drs. Theodorus Sitokdana yang adalah mantan staf di yayasan Binterbusih sehingga secara kekeluargaan mempercayakan Yayasan Binterbusih untuk menangani mahasiswa Kabupaten Pegunungan Bintang. Kemudian pada tahun 2005 setelah terpilihnya bupati

defenitif, pemerintah daerah mengirim 9 mahasiswa dan tahun 2006 mengirim 15 mahasiswa ke STIPAN Jakarta. Program pendidikan di STIPAN selama 2 tahun atau setara dengan diploma dua, akan tetapi kebijakan pemerintahan dalam negeri untuk mempersiapkan tenaga professional dibidang pemerintahan sehingga tetap mengakui sebagai pendidikan sarjana strata satu (S1).

Kemudian banyak pihak meragukan kualitas STIPAN sehingga Drs. Theodorus Sitokdana yang adalah wakil bupati pada waktu itu, memandang “untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal perlu dilalui dengan proses pendidikan yang panjang dan sistematis sehingga seseorang harus benar-benar matang secara intelejensi, emosional dan spritual”. Dengan demikian pada tahun 2007 Mantan Wakil Bupati Drs. Theodorus Sitokdana yang juga adalah alumni program ekstensi bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma melakukan MOU dengan FKIP Universitas Sanata Dharma (USD) untuk jangkah waktu 6 tahun (6 angkatan penerima beasiswa). Pada tahun yang sama pemerintah daerah mengirim 25 mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan matrikulasi selama 1 tahun (pembekalan) dan dilanjutkan dengan program kuliah strata satu (S1) dengan maksud agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan ketika mengikuti kuliah aktif dilingkungan USD.

Kemudian pada tahun yang sama pemerintah daerah mengirim pelajar ke Semarang dengan jumlah 16 orang, mereka tidak mengikuti program matrikulasi (langsung masuk ke SMA/SMK) sehingga banyak yang mengalami kesulitan, bahkan 8 pelajar pulang ke Papua karena belum bisa menyesuaikan diri dengan iklim pendidikan di kota Semarang, dan yang masih bertahanpun mengalami banyak masalah, terutama kesulitan dalam menerima pelajaran yang berkaitan dengan hitung-menghitung. Dengan demikian mulai tahun 2008 Yayasan Binterbusih memprogramkan sistem matrikulasi (pembekalan) satu tahun, sebelum memasuki pendidikan ditingkat sekolah menengah atas.

Tahun 2008 pemerintah daerah mengirim 25 orang, berdasarkan hasil evaluasi studi angkatan pertama dan angkatan kedua menunjukkan angkatan kedua jauh lebih baik dibanding angkatan pertama, dapat dilihat dari prestasi belajar ketika menumpuh pendidikan di sekolah menengah atas, salah satu pelajar

yang ikut matrikulasi berhasil masuk di sekolah bergengsi di kota Semarang yaitu SMA Donbosko Program MIPA, melihat peningkatan prestasi belajar maka yayasan Binterbusih menetapkan program matrikulasi berlanjut untuk setiap tahun.

Pada tahun yang sama (2008) pemerintah daerah mengirim 25 mahasiswa ke USD. Kemudian tahun 2009 mengirim 25 mahasiswa ke USD, 5 pelajar SMA dan 5 pelajar SD ke Surya Institut Tangerang untuk pembekalan ilmu MIPA oleh Prof. Yohanes Surya, Ph.D. Tahun 2010 pengiriman mahasiswa ke USD 11 orang, dan ke Universitas Gadjah Mada (UGM) sebanyak 11 mahasiswa melalui jalur kerja sama MOU, pengiriman 9 pelajar ke Yayasan Binterbusih ditambah 4 orang diluar pengiriman pemerintah daerah sehingga 13 pelajar, dan pengiriman mahasiswa ke Surya institute 10 mahasiswa untuk bidang kejuruan jurusan MIPA.

Setelah adanya proses politik dan pergantian jabatan lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, aspek pendidikan tidak mendapatkan perhatian secara serius, ketidakseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia mulai nampak yang dapat dilihat bahwa tahun 2011 dan 2012 tidak ada pengiriman mahasiswa dan pelajar ke lembaga/institusi kerja sama. Diperparah lagi dengan adanya proses politik pemilihan gubernur, pemerintah daerah hanya fokus pada pesta politik semata, wakil bupati yang notabennya adalah anak asli Kabupaten Pegunungan Bintang hanya diam tanpa ada kebijakan nyata demi daerahnya. Dua tahun terakhir 2013-2015 pemerintah daerah tidak mengirim mahasiswa ke lembaga/ institusi terkait, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak konsisten terhadap kesepakatan MOU. (<http://www.komapo.org>, diakses pada tanggal 05 April 2016, 19:20).

Berdasarkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia tersebut dikaitkan dengan masalah-masalah yang akan dibahas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang ***“Manajemen Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Tinggi”***.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Anwar Prabu Mangkunegara. 2001. *Manajemen sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Adisasmitha, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Armstrong, Michael. 1994. *Seri Pedoman Manajemen, Manajemen Sumber Daya Alam*. Jakarta: Gramedia
- Flippo, Edwin, B. 1996. *Manajemen personalia*, Edisi Keenam, Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
- Hamalik, Oemar. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hanif Nurcholis, dkk. 2009. *Perencanaan Partisipasif Pemerintah Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Saydam, Gouzali. 2000. Sumber Daya Manusia dan Kinerja (Human Resources Management), Jilid 2. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P. 1996. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 1991. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinammora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi III. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Soedaryamanti. 2001. *Sumber Daya manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zainun, Buchari. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.

Sumber lain

Papua Newas, Media Online Jubi, diakses di <http://tabloidjubi.com/>, pada tanggal 20 Juni 2016.

Website Resmi Kabupaten Pegunungan Bintang, diakses di <http://www.pegbintangkab.go.id>, pada tanggal 17 Juni 2016.

Website Resmi Komunitas Mahasiswa Pelajar Aplim Apom (KOMAPO) Kabupaten Pegunungan Bintang, diakses di <http://komapo.org/>, pada tanggal 18 Juni 2016.

Website Resmi Universitas Sanata Dharma, diakses di <https://www.usd.ac.id/>, pada tanggal 21 Juni 2016.

BPS dan BP3D Provinsi Papua. (2001). *Irian Jaya dalam Agenda 2000*.

CSIS. (2004). *Membangun Kapasitas Untuk Implementasi Otonomi Khusus di Papua*.

DPR-RI. (2001). *Draf Akhir Pansus RUU Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*

Departemen Dalam Negeri. (2002). *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999. *Tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. 2009. *Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. 2011. *Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015*

Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. 2015. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2015*

Pemerintah Provinsi Papua. (2002). *Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Majelis Rakyat Papua.*

Pemerintah Propinsi Irian Jaya. (2001). *Draf RUU Otonomi Khusus bagi Papua dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri.*